

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pembangunan Nasional dalam bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur, serta memungkinkan para warganya mengembangkan diri baik berkenaan dengan aspek jasmani maupun rohani berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Untuk menuju perwujudan masyarakat yang adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, maka pembangunan dalam bidang pendidikan memegang peranan penting di samping sektor lainnya.

Memperhatikan peran dan fungsi pendidikan tersebut terutama pendidikan formal melalui sekolah yang begitu penting dan sentral mengisyaratkan perlunya pendidikan dan perhatian agar dalam pengelolaannya dan pembinaannya dilakukan secara terarah dan sistematis. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila di bidang pendidikan maka dari itu pendidikan nasional mengusahakan pembentukan manusia Pancasila sebagai manusia yang tinggi kualitasnya dan pemberian dukungan bagi perkembangan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang terwujudnya kemampuan bangsa menangkal setiap ajaran-ajaran yang bertentangan dengan paham Pancasila.

Sebagai perwujudan cita-cita nasional tersebut telah diterbitkan UU RI

berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu pendidikan, kehidupan, dan martabat manusia Indonesia dalam rangka untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan serta kesempatan seluas-luasnya untuk mengikuti pendidikan (UU RI No. 20 Tahun 2003 Pasal 5).

Sistem pendidikan nasional diselenggarakan melalui dua jalur yaitu jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah. Pendidikan keluarga merupakan bagian dari jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dengan pendekatan kelompok, klasikal, individu, mewujudkan program dengan ketrampilan fungsional dan pendekatan dengan deret ukur naik dalam pembinaan program (Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1991).

Sedangkan jalur pendidikan sekolah merupakan pendidikan sekolah yang diselenggarakan di sekolah melalui kegiatan belajar-mengajar secara berjenjang dan berkesinambungan. Jenjang pendidikan sekolah terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi (UU RI No. 20 Tahun 2003 Pasal 14).

Upaya peningkatan efisiensi pendidikan paling tidak dapat ditentukan oleh dua hal, yaitu pengelolaan pendidikan yang profesional dan partisipasi dalam pengelolaan pendidikan. Pengelolaan pendidikan yang efisiensi merupakan salah satu strategi pokok Departemen Pendidikan Nasional. Hal ini sangat ditentukan oleh kemampuan aparat dalam pengambilan keputusan, perencanaan dan pengelolaan pendidikan secara institusional. Peningkatan efisiensi pendidikan

Teori Neo Klasik, Douglas M. Windham mengatakan :

Program-program pendidikan yang efisiensi, yang berlangsung ke dalam sistem pasar yang sempurna ditandai oleh lembaga-lembaga pendidikan yang berkemauan tinggi yang melakukan sistem monitoring sendiri dan proses penyeimbangan sendiri, sehubungan dengan program-program pendidikan yang kompetitif (Ace Suryadi, 1995 : 11)

Tinggi rendahnya kualitas masyarakat dapat ditentukan melalui tingkat pendidikannya. Menurut Prof. Dr. Santoso S. Hamijoyo, salah satu factor penting dari kemajuan dan martabat suatu bangsa dan negara khususnya negara berkembang dapat dilihat dari berhasil tidaknya pendidikan pada tingkat dasar. Logikanya pendidikan dasar akan mempengaruhi pendidikan tinggi. Hal ini sesuai dengan apa yang biasa disebut pendidikan dasar sebagai basis ekologi dengan timbulnya bibit unggul.

Dalam upaya peningkatan mutu pendidikan dasar di masa yang akan datang akan berhadapan dengan situasi dan persoalan yang dapat mempengaruhinya, baik secara langsung ataupun tidak langsung, sebagai akibat dari globalisasi dan industrialisasi. Memasuki arus globalisasi dan industrialisasi, pendidikan di Indonesia berhadapan dengan berbagai alternatif masa depan yang belum menentu. Kegagalan membuat suatu scenario program pendidikan maka berarti kehilangan kesempatan untuk maju dalam bidang pendidikan nasional, tapi kita juga harus ingat akan kebutuhan yang berkenaan dengan fasilitas dan lingkungan sekolah (gedung, sarana belajar, guru, proses belajar dan kurikulum).

Sementara di kota Jogja adalah salah satu dari sekian banyak kota di Indonesia yang juga tidak terlepas dari persoalan-persoalan dunia pendidikan.

Kota Jogja dari tahun ke tahun terus berkembang pesat pembangunan

kota Jogja merupakan salah satu kota sebagai pusat pendidikan yang ada di Indonesia. Mau tidak mau kota Jogja harus menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terjadi maupun yang akan terjadi. Pembangunan di kota Joga bersifat ekonomis, artinya bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Karena letaknya yang strategis maka pemerintah kota Jogja terus gencar melakukan pembangunan dalam bidang pendidikan dan pembangunan di bidang lainnya.

Dari sektor pendidikan, institusi atau dinas yang terkait melakukan tahap perbaikan dalam rangka untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan yang ada untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Pembaharuan-pembaharuan terus dilakukan baik sarana dari segi kebijakan maupun sarana dan prasarana yang mendukung pendidikan. Semisal dengan pengadaan fasilitas-fasilitas belajar serta pengadaan ataupun pembaharuan gedung sekolah yang layak untuk kegiatan belajar-mengajar. Pemerintah daerah kota Jogja diharapkan di masa yang akan datang dapat menjadi kota pendidikan yang sesuai dengan predikat yang disandangnya adan mampu untuk menciptakan bibit-bibit unggul yang nantinya mampu bersaing di dunia kerja, serta terciptanya SDM yang handal dan berkualitas untuk menghadapi arus globalisasi.

Oleh karena itu kebijakan sektor pendidikan harus benar-benar tepat sasaran sehingga tercipta masyarakat adil dan makmur. Dalam hal ini peran dinas pendidikan dan pengajaran sangat penting karena merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab langsung terhadap mutu pendidikan serta mengimplementasikan kebijakan sektor pendidikan bagi masyarakat yang ada di

daerahnya. Perihal apa yang menjadi keputusan dinas tersebut yang terkait dengan kebijakan pendidikan diharapkan mampu untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang ada sesuai dengan kemajuan dan kebutuhan zaman yang semakin berkembang. Pemerataan pertumbuhan dan stabilitas sebagai pendorong, penggerak, dan penunjang pembangunan nasional dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Perkembangan pendidikan pada saat sekarang ini khususnya di kota Yogyakarta berlangsung pesat, sementara sarana dan prasarana pendidikan sebagai alat penunjang proses pendidikan belum mampu untuk mengimbangi perkembangan pendidikan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut setiap tahun ajaran diadakan analisa mengenai sarana dan prasarana pendidikan sudah mampukah untuk menunjang proses pendidikan.

Perbaikan sarana dan prasarana pendidikan didasarkan pada perubahan kurikulum pada setiap tahun ajaran. Proses perbaikan sarana dan prasarana pendidikan ini dilakukan dengan cara menganalisa sarana dan prasarana pendidikan di setiap sekolah yang ada di kota Yogyakarta apakah masih mampu untuk menunjang proses pembelajaran, analisa tersebut dilakukan setiap tahun ajaran. Misalnya mengenai gedung sekolah, perabot sekolah, alat pembelajaran, buku, sarana mebelair. Setiap tahun ajaran selalu mengalami perubahan karena disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Dengan adanya analisa setiap tahun ajaran maka diharapkan mampu untuk mengatasi permasalahan sarana dan prasarana pendidikan. Dengan tujuan agar tercapai keseimbangan antara peningkatan mutu

pendidikan dengan peningkatan mutu sarana dan prasarana pendidikan sebagai alat penunjang proses pembelajaran di sekolah.

B. PERUMUSAN MASALAH

Di dalam melakukan sebuah penelitian sosial, adalah merupakan hal yang sangat pokok untuk merumuskan permasalahan dalam penelitian tersebut, karena hal itu merupakan suatu batasan sekaligus pedoman dan pegangan dalam pelaksanaan suatu penelitian di lapangan.

Adanya penemuan dan perumusan permasalahan di lapangan dapat memberikan daya dorong keingintahuan seseorang peneliti akan sesuatu yang hendak diketahuinya, yang kemudian hal tersebut dapat dijadikan suatu pengetahuan baru sehingga pada akhirnya dapat memperluas khasanah pengetahuan.

Sehingga dari uraian permasalahan yang telah dipaparkan penulis di atas, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implementasi dari kebijakan sarana dan prasarana pendidikan di kota Yogyakarta 2003-2005 ?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi kebijakan sarana dan prasarana pendidikan di kota Yogyakarta ?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Mengetahui pelaksanaan implementasi kebijakan tentang sarana dan prasarana pendidikan terhadap keberhasilan pendidikan masyarakat

2. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

D. KERANGKA DASAR TEORI

Kerangka dasar teori merupakan bagian yang terdiri dari uraian yang menjelaskan variabel-variabel dan hubungan-hubungan antar variabel berdasarkan konsep definisi tertentu. Dan di dalam bagian ini dikemukakan teori yang menjadi acuan bagi penelitian yang dilakukan.

Menurut Koentjoroningrat, (1991 : 11)

“Teori adalah merupakan pernyataan mengenai adanya suatu hubungan antara gejala yang diteliti dalam satu atau beberapa factor tertentu dalam masyarakat”.

Menurut Sofyan Efendi, (1989 : 37)

“Teori adalah merupakan penelitian yang paling besar perannya bagi peneliti, karena dalam unsur inilah peneliti mencoba menerangkan fenomena alami yang menjadi pusat perhatian”.

Dengan demikian teori merupakan sarana pokok yang menyatakan hubungan sistematis antara fenomena sosial maupun alami yang hendak diteliti, sedangkan landasan pemikiran yang digunakan sebagai dasar atau pijakan dalam penelitian ini adalah :

1. Pendidikan

Manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya. Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan / atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 31

ayat (1) menyebutkan menegaskan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu system pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan Undang-Undang. Untuk itu seluruh komponen bangsa wajib mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan bangsa.

Dalam kajian dan pemikiran pendidikan terlebih dahulu perlu diketahui dua istilah yang hampir sama bentuknya dan sering dipergunakan dalam dunia pendidikan, yaitu : pedagogi (pendidikan) dan pedagogif (ilmu pendidikan). Dalam pengertian yang sederhana dan umum maka pendidikan dapat diartikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (UU RI No 20 Tahun). Atau dengan kata lain bahwa pendidikan dapat diartikan sebagai suatu peradaban bangsa yang dikembangkan atas dasar pandangan hidup bangsa itu sendiri (nilai dan norma masyarakat) yang berfungsi sebagai filsafat pendidikan atau sebagai cita-cita dan tujuan pendidikannya. Sekaligus juga menunjukkan sesuatu bagaimana warga negara, bangsanya berpikir dan berperilaku secara turun-temurun sehingga kepada generasi berikutnya yang dalam perkembangannya akan mencapai pada tingkat peradaban yang lebih

Pendidikan bagi bangsa yang sedang membangun seperti Indonesia saat ini merupakan kebutuhan mutlak yang harus dikembangkan sejalan dengan tuntutan pembangunan tahap demi tahap. Pendidikan yang dikelola dengan tertib dan teratur, efektif dan efisien (berdaya guna dan berhasil) akan mampu mempercepat jalannya pembudayaan bangsa yang berdasarkan pokok pada penciptaan kesejahteraan umum dan pencerdasan bangsa kita sesuai dengan tujuan nasional seperti tercantum dalam alenia IV Pembukaan UUD 1945. pelaksanaan pendidikan tidak terlepas dari faktor psikologi manusia, di samping faktor lingkungan sekitar maka proses pendidikan perlu atau wajib berpegang pada petunjuk-petunjuk dari para ahli psikologi pendidikan dan perkembangan, termasuk psikologi agama. Tanpa petunjuk psikologi proses pendidikan tidak mengena pada sasarannya secara tepat guna. Pendidikan sebagai salah satu faktor penting dalam pembangunan nasional, dijadikan andalan utama untuk berfungsi semaksimal mungkin dalam upaya peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia, di mana iman dan ketaqwaan pada Tuhan Yang Maha Esa menjadi sumber motivasi yang utama. Ada beberapa definisi tentang pendidikan yang dikemukakan oleh para ahli :

- a. Driyarkara : pendidikan adalah upaya memanusiakan manusia muda. Pengangkatan manusia dalam taraf instansi itulah yang disebut mendidik. Pendidikan adalah pemanusiaan manusia muda (Ditjen Dikte 1983/1984 : 14).
- b. Ki Hajar Dewantara dalam Konggres Taman Siswa yang pertama pada tahun 1920 memaparkan pendidikan sebagai proses memanusiakan manusia.

memajukan pertumbuhan budi pekerti (kekuatan batin, karakter) pikiran (intelekt) dan tubuh anak; dalam Taman Siswa tidak boleh dipisahkan-pisahkan bagian-bagian itu agar kita dapat memajukan kesempurnaan hidup, kehidupan dan penghidupan anak-anak yang kita didik selaras dengan kehidupannya (H.A.R. Tilaar, 1992 : 75).

- c. Crow and crow menyebut pendidikan adalah proses yang berisi berbagai macam kegiatan yang cocok bagi individu untuk kehidupan sosialnya dan membantu meneruskan adat dan budaya serta kelembagaan social dari generasi ke generasi (H.A.R. Tilaar, 1992 : 75).

Dapat disebutkan bahwa pendidikan pada hakikatnya adalah usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam dan luar sekolah dan berlangsung seumur hidup.

Gerakan reformasi di Indonesia secara umum menuntut diterapkannya prinsip demokrasi, desentralisasi, keadilan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hubungannya dengan pendidikan, prinsip-prinsip tersebut akan memberikan dampak yang mendasar pada kandungan, proses dan manajemen sistem pendidikan. Selain itu, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat dan memunculkan tuntutan baru dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam sistem pendidikan. Tuntutan tersebut menyangkut pembaharuan sistem pendidikan, diantaranya pembaharuan kurikulum, yaitu diversifikasi kurikulum untuk melayani peserta didik dan potensi daerah yang beragam, diversifikasi jenis

kompetensi tamatan yang berlaku secara nasional dan daerah menyesuaikan dengan kondisi setempat.

Pendidikan Nasional mempunyai visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan produktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Dengan visi pendidikan tersebut, pendidikan mempunyai misi sebagai berikut :

- a. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia.
- b. Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar.
- c. Meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang normal.
- d. Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, ketrampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global.
- e. Memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks negara kesatuan RI.

Berdasarkan visi dan misi pendidikan tersebut, pendidikan berfungsi

yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

2. Manajemen Pendidikan

Istilah manajemen memiliki banyak arti, bergantung pada orang yang mengartikannya. Istilah manajemen pendidikan acapkali dibandingkan dengan administrasi pendidikan. Manajemen pendidikan mengandung arti sebagai suatu proses kerjasama yang sistematis, sistemik, dan komprehensif dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Manajemen pendidikan juga dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang telah berkenaan dengan pengelolaan proses pendidikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, baik tujuan jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Manajemen atau pengelolaan merupakan komponen integral dan tidak dapat dipisahkan dari proses pendidikan secara keseluruhan. Alasannya tanpa manajemen tidak mungkin tujuan pendidikan dapat diwujudkan secara optimal, efektif dan efisien.

Peningkatan kualitas pendidikan juga menuntut manajemen pendidikan yang lebih baik. Manajemen pendidikan merupakan alternatif yang strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Manajemen pendidikan akan secara langsung mempengaruhi dan menentukan efektif tidaknya kurikulum, peralatan belajar, waktu mengajar dan proses pembelajaran. Dengan demikian upaya peningkatan kualitas pendidikan harus dimulai dengan membenahi

manajemen pendidikan, di samping peningkatan kualitas dengan pembenahan pengembangan sumber belajar.

Adapun komponen-komponen manajemen pendidikan yang harus benar-benar diperhatikan antara lain :

a. Manajemen Tenaga Kependidikan (Guru dan Personil)

Keberhasilan manajemen pendidikan sangat ditentukan oleh keberhasilan pimpinannya dalam mengelola tenaga kependidikan yang tersedia di sekolah. Dalam hal ini peningkatan produktivitas dan prestasi kerja dapat dilakukan dengan meningkatkan perilaku manusia di tempat kerja melalui aplikasi konsep dan teknik manajemen personalia modern. Manajemen tenaga kependidikan atau manajemen personalia pendidikan bertujuan untuk mendayagunakan tenaga kependidikan secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang optimal.

Pengadaan pegawai merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pegawai pada suatu lembaga, baik jumlah maupun kualitasnya. Untuk mendapatkan pegawai dilakukan dengan cara recruitment, yaitu usaha untuk mendapatkan calon-calon pegawai yang memenuhi syarat dan kemudian dipilih yang terbaik. Sedangkan pemberhentian pegawai fungsi personalia yang menyebabkan terlepasnya pihak organisasi dan personil dari hak dan kewajiban lembaga sebagai tempat bekerja dan sebagai pegawai. Kompensasi adalah balas jasa yang diberikan organisasi kepada pegawai yang dapat dinilai dengan uang dan mempunyai

kecenderungan diberikan berupa gaji, tunjangan, fasilitas perumahan dan lain-lain.

Untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang dikemukakan terdahulu, diperlukan sistem penilaian pegawai secara obyektif dan akurat. Penilaian tenaga kependidikan ini difokuskan pada prestasi individu dan peran sertanya dalam pengambilan keputusan berbagai hal, seperti identifikasi kebutuhan, promosi, sistem imbalan dan aspek lainnya.

b. Manajemen Kesiswaan

Manajemen kesiswaan adalah penataan dan pengaturan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik, mulai masuk sampai dengan keluarnya peserta didik tersebut dari suatu sekolah. Manajemen kesiswaan bertujuan untuk mengatur berbagai kegiatan dalam bidang kesiswaan agar kegiatan pembelajaran di sekolah dapat berjalan lancar. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, bidang manajemen kesiswaan mempunyai tiga tugas utama yang harus diperhatikan, yaitu penerimaan murid baru, kegiatan kemajuan belajar, serta bimbingan dan pembinaan disiplin.

Tujuan pendidikan tidak hanya untuk mengembangkan pengetahuan anak, tetapi juga sikap kepribadian serta aspek social emosional di samping ketrampilan-ketrampilan lain. Sekolah tidak hanya bertanggung jawab memberikan ilmu pengetahuan. Untuk kepentingan tersebut diperlukan data yang lengkap tentang peserta didik. Untuk itu sekolah

perlu melakukan pencatatan dan ketatalaksanaan kesiswaan dalam bentuk buku laporan.

c. **Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan**

Sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dalam menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar, seperti gedung, ruang kelas, meja, kursi. Adapun yang dimaksud dengan prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan bertugas mengatur dan menjaga sarana dan prasarana pendidikan agar dapat memberikan kontribusi secara optimal dan berarti pada jalannya proses pendidikan. Kegiatan pengelolaan ini meliputi kegiatan perencanaan, pengadaan, pengawasan, penyimpanan inventarisasi, dan penghapusan serta penataan.

Manajemen sarana dan prasarana pendidikan yang baik diharapkan dapat menciptakan sekolah yang bersih, rapi, indah sehingga menciptakan kondisi yang menyenangkan baik bagi guru maupun murid untuk berada di sekolah. Di samping itu juga diharapkan tersedianya alat-alat atau fasilitas belajar yang memadai secara kuantitatif, kualitatif dan relevan dengan kebutuhan serta dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan proses pendidikan dan pengajaran.

d. **Manajemen Kurikulum dan Program Pengajaran**

Manajemen kurikulum dan program pengajaran mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan penilaian kurikulum, perencanaan dan

pengembangan kurikulum nasional. Karena itu level sekolah yang paling penting adalah bagaimana menyesuaikan dan merealisasikan kurikulum tersebut dengan kegiatan pembelajaran. Sekolah merupakan ujung tombak pelaksanaan kurikulum, baik kurikulum local ataupun nasional yang diwujudkan melalui proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

Manajemen atau adminisstrasi pengajaran adalah keseluruhan proses penyelenggaraan kegiatan di bidang pengajaran yang bertujuan agar seluruh kegiatan pengajaran terlaksana secara efektif dan efisien. Manajer sekolah diharapkan dapat membimbing dan mengarahkan pengembangan kurikulum dan program pengajaran serta melakukan pengawasan dalam pelaksanaannya. Kepala sekolah merupakan seorang manajer di sekolah, maka ia harus bertanggung jawab terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian perubahan atau perbaikan program pengajaran di sekolah. Dalam pada itu perlu dilakukan pembagian tugas guru, penyusunan kalender pendidikan dan jadwal pelajaran, pembagian waktu yang digunakan, penetapan penilaian, penetapan norma kenaikan kelas serta peningkatan perbaikan pengajaran.

3. Kebijakan

Secara etimologis berasal dari kata policy, atau dengan kata lain politik. Pada hakekatnya proses kebijakan itu adalah merupakan proses politik. Proses kebijakan merumuskan masalah merupakan kegiatan yang pertama kali harus dilakukan oleh pembuat sebuah kebijakan

Dalam Muhammad Zaenuri (Catatan Kuliah Kebijakan Publik), R. S. Parker memberikan pengertian kebijakan sebagai :

“Suatu tujuan tertentu atau serangkaian prinsip atau tindakan yang dilakukan oleh suatu pemerintah pada periode tertentu dalam hubungan dengan suatu subyek sehingga tanggapan terhadap suatu permasalahan yang ada di masyarakat”

“Kebijakan negara sebagai serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh sekelompok aktor politik berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam situasi dimana keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari pada aktor tersebut” (Solichin Abdul Wahab, 2001 : 4).

Miftah Thoha (1993 : 58), menyatakan kebijakan dalam arti luas ada 2 aspek pokok, yaitu :

- a. Policy merupakan praktika sosial, ia bukan event tunggal, dengan demikian sesuatu yang dihasilkan pemerintah berasal dari kejadian dalam masyarakat dan dipergunakan pula untuk kepentingan masyarakat.
- b. Policy adalah suatu peristiwa yang ditentukan baik untuk mendamaikan “claim” dari pihak-pihak konflik atau untuk menciptakan “incentive” bagi tindakan bersama dengan pihak yang menetapkan tujuan, akan tetapi mendapatkan perlakuan yang tidak rasional dalam usaha bersama tersebut.

Sementara Carl Federick menyatakan bahwa :

“Policy adalah serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesepakatan-kesepakatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam mencapai suatu tujuan tertentu”

Dari paparan di atas mengenai policy / kebijakan yang dituliskan oleh

penulis di atas selanjutnya akan dipaparkan mengenai beberapa definisi dari

public policy / kebijakan publik. Seperti diantaranya yang dikemukakan oleh Thomas R Day sebagai berikut :

“Kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan (public policy is what ever government choose to do or not to do)”

Sedangkan menurut S.E. Anderson, yang dimaksud dengan kebijakan publik adalah :

“Kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah (public policy are those policies developed by developmental bodies and officials)”

Dari beberapa pendapat di atas, kebijakan adalah suatu keterkaitan dari pilihan-pilihan kolektif yang saling bergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan atau instansi pemerintah tertentu sehubungan untuk mencapai tujuan dalam mewujudkan sasaran yang diinginkan untuk kepentingan masyarakat.

4. Implementasi Kebijakan

Jimmi Muhammad Ibrahim menyebutkan public policy dan implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai :

“Suatu implementasi urusan kepentingan umum, urusan kenegaraan atau dapat juga disebut implementasi kebijakan pemerintah” (Jimmi, 1991 : 14).

Menurut Amir Santoso (1990 : 9) :

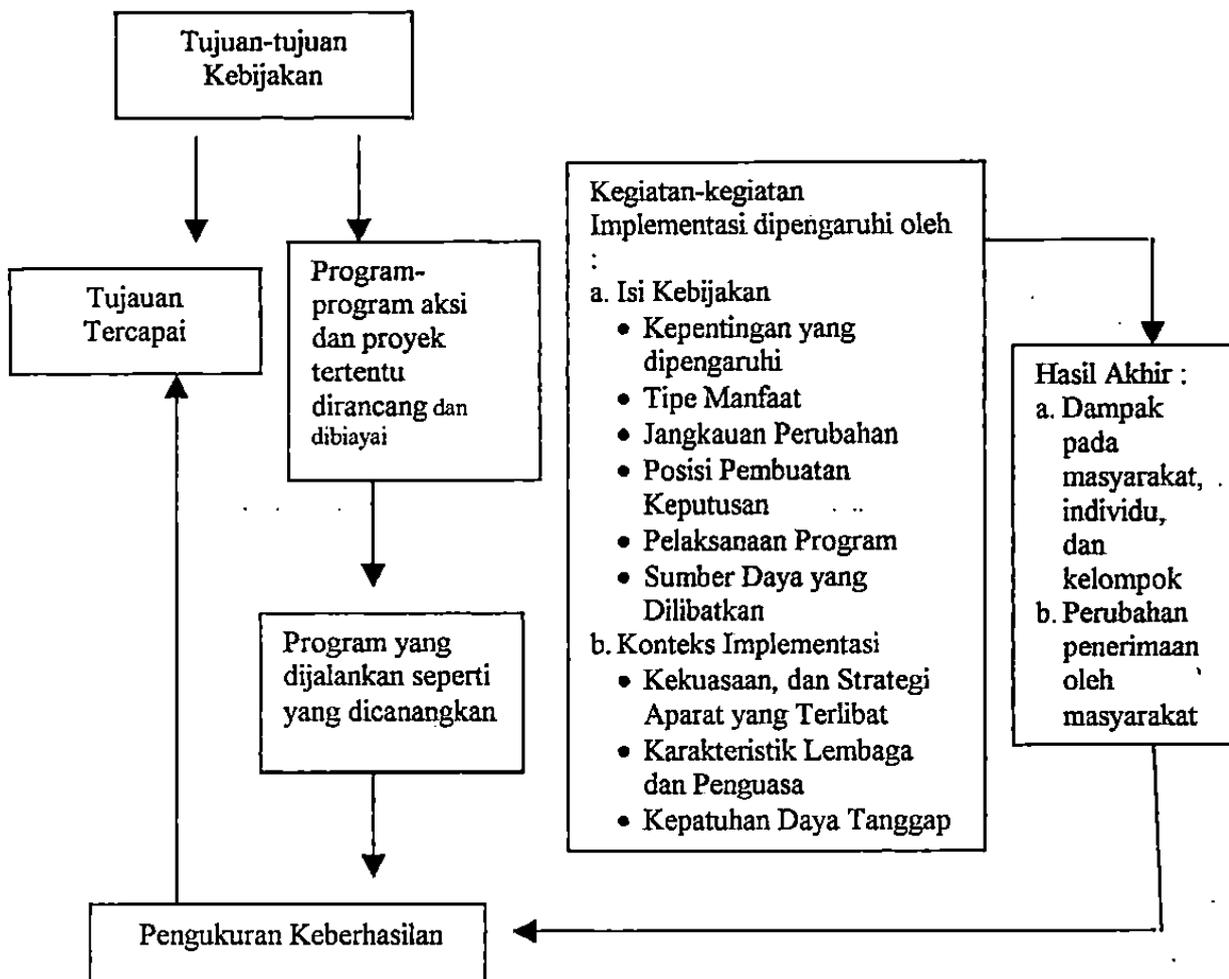
“Analisis mengenai pelaksanaan kebijakan (policy implementation) mencoba mempelajari sebab-sebab keberhasilan / kegagalan kebijakan melalui pembahasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan seperti masalah kepemimpinan dan interaksi politik diantara pelaksanaan kebijakan, sedangkan di dalam pelaksanaannya kebijakan itu tidak hanya bersifat akademis administrasi belaka tetapi melibatkan masalah-masalah politik. Dengan demikian studi implementasi mencoba menjawab pertanyaan mengapa

hal itu terjadi dan tidak terhenti hanya pada pertanyaan apa yang terjadi”.

Untuk lebih memahami pentingnya implementasi kebijakan maka dikembangkan beberapa model implementasi seperti berikut ini :

1. Menurut Grindle, Implementasi kebijakan ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Studi ini melihat adanya tiga dimensi-dimensi analisis dalam organisasi, yaitu tujuan, pelaksanaan, tugas, dan kaitan organisasi dengan lingkungan. Ide dasar Grindle adalah bahwa kebijakan ditransformasikan menjadi program-program aksi maupun proyek individual dengan biaya yang telah disediakan, maka implementasi kebijakan dapat dilakukan (Samudra Wibawa,1991:22). Untuk lebih jelasnya lagi akan digambarkan dalam model sebagai berikut :

Gambar I.1.
Model Implementasi Kebijakan menurut Grindle



Dari bagan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

➤ Isi Kebijakan

1. Kepentingan yang dipengaruhi

Kepentingan yang menyangkut banyak kepentingan yang berbeda akan sulit diimplementasikan dibanding yang menyangkut sedikit

2. Tipe Manfaat

Suatu kebijakan yang memberikan manfaat dan langsung dapat dirasakan oleh sasaran, bukan hanya formal, ritual, dan simbolis, akan tetapi konkrit akan lebih mudah diimplementasikan.

3. Derajat perubahan yang diharapkan

Kebijakan cenderung lebih mudah diimplementasikan jika dampak yang diharapkan dapat memberi hasil yang pemanfaatannya jelas dibandingkan dengan yang bertujuan terjadi perubahan sikap dan perilaku penerima kebijakan.

4. Letak pengambil keputusan

Kedudukan pembuat kebijakan akan mempengaruhi implementasi, selanjutnya pembuatan kebijakan yang mempunyai kewenangan dan otoritas yang tinggi akan lebih mudah dan mempunyai wewenang dalam pengkoordinasian di bawahnya.

5. Pelaksana Program

Keputusan siapa yang akan ditugasi untuk mengimplementasikan program yang ada dapat mempengaruhi proses implementasi dan hasilnya. Dalam hal ini tingkat kemampuan, keefektifan, dan dedikasi yang tinggi akan berpengaruh dalam prosesnya.

6. Sumber daya yang dilibatkan

Sumber daya yang digunakan dalam program bentuk besar dan

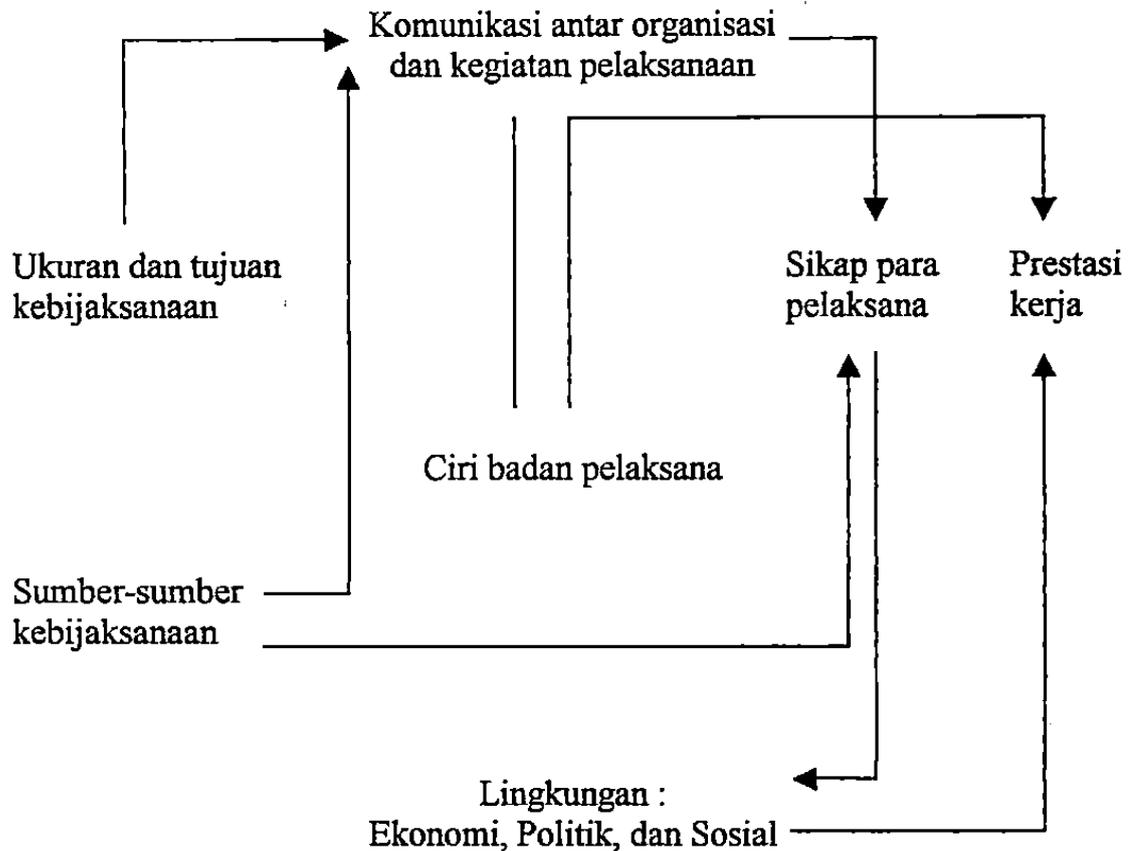
➤ Konteks Implementasi

1. Strategi yang digunakan dalam proses, kekuasaan, dan badan pelaksana ataupun elit politik dan penguasa setempat akan mempengaruhi implementasi kebijakan.
2. Kondisi dan keberadaan badan pelaksana yang didukung otoritas penguasa akan sangat berpengaruh.
3. Kepatuhan dapat berupa dukungan dari elit politik, kesediaan instansi pelaksana program, juga kepatuhan masyarakat penerima manfaat/sasaran program. Sedangkan daya tanggap berupa kepekaan lembaga publik seperti birokrasi terhadap kebutuhan atau permasalahan yang timbul dari implementasi kebijakan.

2. Van Meter dan Van Horn merumuskan proses implementasi sebagai berikut :

“Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu / pejabat atau kelompok pemerintah / swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam suatu keputusan kebijaksanaan” (Solichin Abdul Wahab, 1997 : 65).

Model implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn

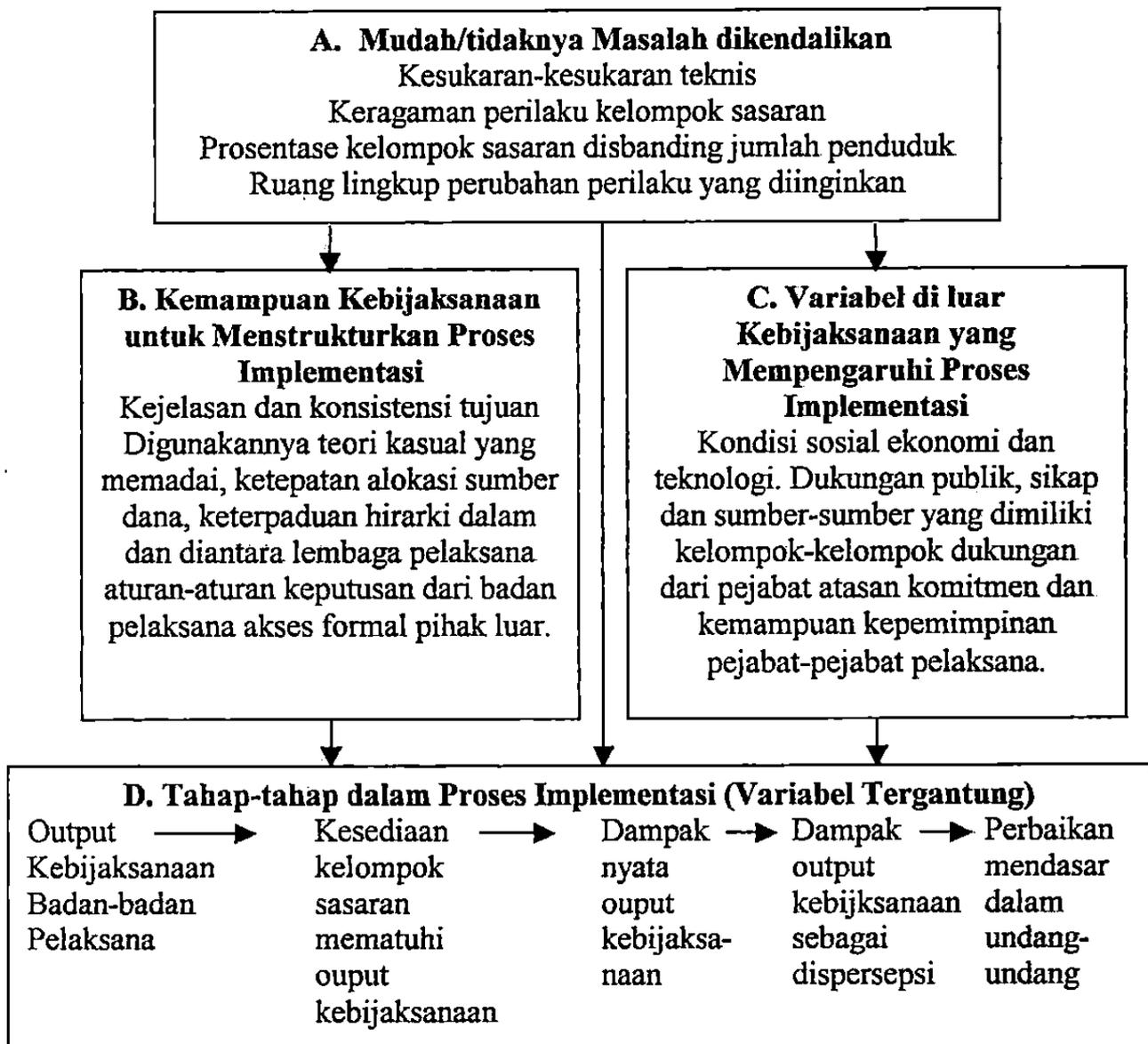


Gambar 1.1. Variabel Proses Implementasi Kebijakan

3. Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier menjelaskan makna implementasi :

“Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu dinyatakan berlaku / dirumuskan merupakan fokus implementasi kebijakan, yaitu kejadian-kejadian dan tindakan-tindakan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak

Model Implementasi Kebijakan Menurut Mazmanian dan Sabatier :



pendapat dan mencakup tidak hanya pengujian kebijakan dengan memilah-milahkannya ke dalam sejumlah komponen, tetapi juga perancangan dan sintesis alternatif-alternatif baru. Kegiatan-kegiatan yang tercakup dapat direntangkan mulai penelitian untuk menjelaskan atau memberikan pandangan terhadap isu-isu atau masalah-masalah yang terantisipasi sampai mengevaluasi suatu program yang lengkap. Beberapa implementasi kebijakan

1. 2001. Suatu model implementasi tidak lebih dari proses keaktifan yang keras dan

cermat, sementara yang lainnya memerlukan pengumpulan data yang ekstensif dan perhitungan yang teliti dengan menggunakan proses matematis yang canggih.

Suatu implementasi tentunya mempunyai tujuan untuk mendapat keberhasilan. Tercapai atau tidaknya suatu tujuan dari implementasi suatu program sangat tergantung oleh adanya faktor-faktor pendukung ikut terlibat di dalamnya. Yang dimaksud dengan faktor-faktor pendukung itu adalah :

- a. Hubungan ketergantungan kecil.
- b. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.
- c. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna.
- d. Tersedianya waktu dan sumber-sumber yang memadai.
- e. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar memadai.

Implementasi kebijakan yang dalam operasionalnya adalah program, dalam prosesnya terdapat 2 unsur pendukung yang penting dan mutlak, yaitu :

- a. Adanya program yang dilaksanakan.
- b. Target group, yaitu kelompok yang menjadi sasaran penerima manfaat program.
- c. Unsur pelaksanaan, yaitu organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan dan pengawasan proses implementasi tersebut (Abdulla M. Syukur, 1998 : 52).

Suatu implementasi dikatakan berhasil jika mencapai tujuan yang diharapkan atau memperoleh hasil. Karena pada prinsipnya suatu

kebijaksanaan dibuat adalah untuk memperoleh hasil yang diinginkan yang dapat dinikmati atau dirasakan oleh pemerintah.

Tetapi terkadang proses pelaksanaan suatu kebijakan itu tidak selalu mencapai keberhasilan dan sebagaimana tertuang dalam rumusan kebijakan dan sering pula menimbulkan kegagalan, sehingga sering muncul semacam pernyataan tentang sebab-sebab timbulnya kegagalan tersebut. Kegagalan dari pelaksanaan kebijakan itu ada sangkut pautnya dengan isi kebijakan yang harus dilaksanakan serta pembagian potensi yang ada.

Sebuah isi kebijakan bisa menyebabkan kegagalan dari suatu pelaksanaan kebijakan terjadi karena samar-samarnya isi dari kebijakan, dalam arti tujuan-tujuan tidak terperinci. Hal ini akan mengakibatkan kurangnya pegangan bagi pelaksana yang akan memperbesar kemungkinan perbedaan pandangan isu kebijakan. Kebijakan yang ingin dijalankan ada kalanya bertentangan dengan kebijakan yang lain. Ini juga merupakan salah satu sebab dari suatu pelaksanaan kebijakan yang tidak berhasil, yaitu terletak pada kurangnya sumber-sumber pendukung antara lain waktu, uang dan tenaga ahli.

Berhasil tidaknya pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan pembagian potensi diantara aktor-aktor yang terlibat, struktur dari organisasi pelaksana dapat juga mengakibatkan masalah. Hal ini apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang dengan pembagian tugas atau ditandai dengan pembatasan-pembatasan yang kurang jelas

Amir Santoso, (1990 : 9) mengutip pendapat Van Meks dan Van Horn tentang variabel-variabel yang membentuk kaitan antara kebijakan dan hasilnya. Variabel-variabel tersebut adalah ukuran tujuan kebijakan, sumber daya, aktivitas komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksanaan, karakteristik dari segi pelaksana, kondisi sosial politik, dan ekonomi, disposisi dari pelaksana dan penyelenggaranya.

5. Implementasi Kebijakan Pendidikan

Setiap pemerintah selalu berusaha agar kebijaksanaannya dipatuhi rakyatnya. Banyak upaya yang selalu ditempuh pemerintah atau organisasi lain untuk membina kepatuhan ini. Pertama, kebijakan itu bertumpu kepada kebutuhan dasar rakyat seperti sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan. Asumsinya apabila kebutuhan dasar itu telah dipenuhi, kemungkinan besar akan mengurangi konflik dan pertentangan yang gawat. Kedua, ganjaran dan hukuman, cara ini adalah cara yang klasik yang sampai sekarang tetap berlaku. Maksudnya adalah memantapkan atau "enforcement" suatu kebijaksanaan dengan memberikan hukuman kepada pilihan diluar kebijaksanaan dan memperoleh ganjaran bila melakukan seperti yang dituntut kebijaksanaan. Ketiga, pembinaan kepatuhan yang berjangka panjang ataupun menengah. Hal ini dilakukan dengan pendidikan dan sosialisasi politik. Kebijaksanaan pendidikan sehubungan dengan hal ini tentu saja berbeda dengan upaya pendidikan memenuhi kebutuhan dasar rakyat. Pendidikan politik rakyat adalah upaya instrumental demi kepentingan politik yang

kurikulum pengajaran yang berbeda, tidak dinilai oleh ujian Negara yang sama, dan diajar oleh guru yang gajinya diatur menurut peraturan daerah yang berbeda.

Keterlibatan pemerintah dalam pendidikan tentu saja memberikan corak tersendiri terhadap pelaksanaan pendidikan. Besar kecilnya keterlibatan itu sebenarnya harus dikaitkan pula dengan keberhasilan mencapai tujuan atau cita-cita pendidikan itu sendiri.

6. Peraturan Daerah

4.1 Peraturan Daerah

Di dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah ada dua macam produk hukum yang utama yang dapat dihasilkan oleh suatu daerah sebagai bentuk kebijakan daerah, yaitu :

a. Peraturan Daerah (Perda)

- Peraturan Daerah Propinsi disusun oleh DPRD Propinsi bersama dengan Gubernur.
- Peraturan Daerah Kabupaten / Kota disusun oleh DPRD Kabupaten / Kota bersama dengan Bupati / Walikota.
- Perdes atau yang setingkat disusun oleh BPD atau yang setingkat. Sedangkan tata cara perubahan Perdes atau yang setingkat diatur oleh Peraturan daerah Kabupaten / Kota yang bersangkutan.

Peraturan Daerah adalah peraturan untuk melaksanakan aturan hukum di daerah dan menampung kondisi khusus di daerah yang

bersangkutan. Kepala Daerah menetapkan Perda atas persetujuan DPRD dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Perda hanya ditandatangani oleh Kepala Daerah dan tidak ditandatangani serta oleh Pimpinan DPRD, karena DPRD bukan merupakan bagian dari Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan daerah lain, dan perundang-undangan yang lebih tinggi. Yang dimaksud dengan Perda lain adalah Peraturan Daerah yang sejenis dan sama kecuali untuk perubahan.

Agar suatu Perda dapat berfungsi efektif, maka sebaiknya dilakukan upaya-upaya untuk mensosialisasikan Peraturan Daerah tersebut. Antara lain dengan melakukan penyuluhan dan menyebarkan melalui media massa, baik cetak maupun elektronik.

Untuk melaksanakan Peraturan daerah, dan atas kuasa dari peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, Kepala Daerah menetapkan Keputusan Kepala Daerah.

b. Keputusan Kepala Daerah

Keputusan Kepala Daerah adalah keputusan Bupati / Walikota sebagai Kepala Daerah untuk melaksanakan Peraturan daerah dan atas kuasa peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Keputusan

Kepala Daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Daerah, dan perundang-undangan lain yang lebih tinggi.

Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang bersifat mengatur, diundangkan dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah. Pengundangan Peraturan daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang bersifat mengatur dilakukan menurut cara yang syah, dan merupakan keharusan agar Peraturan daerah dan Keputusan Kepala daerah tersebut mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

4.2 Sarana dan Prasarana

Menurut Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2000 tentang sarana dan prasarana pendidikan adalah :

- Prasarana berarti alat tidak langsung untuk mencapai tujuan. Dalam pendidikan misalnya lokasi / tempat, bangunan sekolah.
- Sarana adalah alat langsung untuk mencapai tujuan pendidikan, misalnya ruang, buku, perpustakaan, laboratorium, dan sebagainya.

Menurut Keputusan Menteri P dan K No 079 / 1975, sarana pendidikan terdiri atas tiga kelompok besar, yaitu :

- a. Bangunan dan perabot sekolah.
- b. Alat pelajaran yang terdiri atas pembukuan dan alat-alat peraga dan laboratorium.
- c. Media pendidikan yang dapat dikelompokkan menjadi audiovisual yang menggunakan alat transmi

Adapun yang bertanggung jawab tentang sarana dan prasarana pendidikan adalah para pengelola administrasi pendidikan. Secara mikro (sempit) maka kepala sekolah yang bertanggung jawab masalah ini.

Jenis peralatan yang disediakan di sekolah dan cara-cara pengadministrasiannya mempunyai pengaruh besar terhadap program belajar mengajar. Persediaan yang tidak memadai akan menghambat proses belajar mengajar. Tidak berarti dalam hal ini berkaitan dengan masalah dan kebutuhan belajar serta kegunaan hasil belajar karena penyediaan sarana pendidikan di sekolah harus disesuaikan dengan kebutuhan anak didik serta kegunaan hasilnya di masa-masa mendatang.

Untuk menganalisa pelaksanaan implementasi kebijakan sarana dan prasarana pendidikan ini penulis memilih untuk menggunakan teori Grindle karena menurut Grindle pelaksanaan kebijakan banyak dipengaruhi oleh isi kebijakan dan lingkungan yang dapat mendukung atau menghambat pelaksanaan kebijakan tersebut. Dalam hal ini Grindle juga merinci masing-masing faktor utama tersebut dalam berbagai faktor yang lebih spesifik. Isi Kebijakan terdiri dari beberapa faktor yaitu, pertama, kepentingan yang dipengaruhi oleh kebijakan yang bersangkutan. Jika kebijakan sesuai dengan kepentingan masyarakat maka akan secara mudah diimplementasikan sesuai dengan kepentingan masyarakat. Sebaliknya jika bertentangan dengan kepentingan kelompok masyarakat tertentu maka akan sulit diimplementasikan. Kedua, tipe manfaat kebijakan. Tingkat keberhasilan kebijakan dipengaruhi oleh

kejelasan dari manfaatnya. Ketiga, luasnya perubahan yang diharapkan, Semakin banyak perubahan yang dirasakan oleh kelompok masyarakat unruk mengadopsi suatu program maka semakin sulit program itu diimplementasikan. Keempat, Pelaksanaan kebijakan. Sebagai kunci mudah sulitnya implementasi adalah implementator program, bila didukung oleh implementator yang berkemampuan tinggi maka kebijakan tersebut akan implementable. Kelima, Sumber-sumber yang digunakan. Modal, tanah , peralatan, teknologi dan sumberdaya lainnya turut mempengaruhi proses implementasi.

Lingkungan kebijakan meliputi tiga faktor penting yaitu, pertama, kekuasaan, kepentingan dan strategidari actor-aktor yang terlibat. Implementasi kebijakan dilaksanakan dalam suatu sistem politik tertentu yang banyak melibatkan kepentingan baik dipusat ataupun didaerah. Masing-masing kepentingan tersebut seringkali saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya sehingga terjadi konflik kepentingan. Oleh karena itu "siapa mendapat apa" akan ditentukan oleh kekuatan dan strategi masing-masing pihak dalam upaya meraih kepentingannya. Kedua, karakteristik lembaga atau rezim. Kebijakan public dilaksanakan dalam suatu sistem politik tertentu dan sistem ekonomi tertentu. Semua ini saling berinteraksi membentuk lingkungan yang ikut mempengaruhi proses implementasi kebijakan. Ketiga, ketaatan dan daya tanggap. Keberhasilan implementasi kebijakan banyak dipengaruhi oleh ketetapan dari para pelaksana kebijakan terhadap tujuan

yang telah ditetapkan serta daya tanggap untuk memenuhi kebutuhan public. Hal ini dapat dilihat bagaimana aparat pelaksana mau dan mampu untuk memahami tuntutan masyarakat.

Dari berbagai ulasan diatas sesuai dengan teori Grindle maka diharapkan penulis mampu mengulas berbagai fenomena yang ada dalam hal pelaksanaan implementasi kebijakan sarana dan prasarana pendidikan dikota Yogyakarta.

E. DEFINISI KONSEPSIONAL

1. Pendidikan dapat diartikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negar
2. Manajemen pendidikan sebagai suatu proses kerjasama yang sistematis, sistemik dan komprehensif dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional atau segala sesuatu yang berkenaan dengan pengelolaan proses pendidikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
3. Kebijakan adalah suatu keterkaitan dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung termasuk keputusan-keputusan untuk dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan atau instansi pemerintah tertentu sehubungan untuk mencapai tujuan dalam mewujudkan sesama yang diwajibkan untuk

4. Implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh pemerintah, individu ataupun kelompok yang dimaksud untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dalam keputusan. Termasuk di dalamnya adalah supaya mentransformasikan keputusan ke dalam tahap operasional untuk mencapai perubahan seperti yang telah ditetapkan dalam keputusan tersebut.
5. Implementasi kebijakan pendidikan adalah kebijakan pendidikan yang didalamnya ada keterlibatan pemerintah sebagai pembuat kebijakan pendidikan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dengan menetapkan cita-cita dan tujuan pendidikan sesuai kondisi masyarakatnya.
6. Peraturan Daerah adalah peraturan untuk melaksanakan aturan dengan di atasnya dan menampung kondisi khusus di daerah yang bersangkutan. Sarana adalah alat langsung untuk mencapai tujuan pendidikan. Prasarana adalah alat yang tidak langsung untuk mencapai tujuan pendidikan.

F. DEFINISI OPERASIONAL

Definisi operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana caranya mengukur suatu variabel atau dengan kata lain sebagai petunjuk pelaksanaan bagaimana caranya mengukur suatu variabel untuk mempermudah penelitian. Variabel penelitian ini meliputi :

1. Isi Kebijakan Sarana dan Prasarana Pendidikan
 - a. Tujuan – tujuan kebijakan
 - b. Manfaat kebijakan
 - c. Kepentingan yang dipertimbangkan

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan

a. Anggaran

Biaya yang mendukung dan memperlancar tercapainya tujuan kebijakan.

b. Pihak-pihak yang terkait

Peralatan yang mendukung dan memperlancar tercapainya tujuan kebijakan.

c. Pemeliharaan, pemantauan, terhadap sarana dan prasarana pendidikan

3. Lingkungan sosial politik

G. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian metodologi sangat berperan dalam menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian dengan kata lain setiap penelitian harus menggunakan metodologi sebagai tuntutan berfikir yang sistematis agar dapat mempertanggungjawabkan secara ilmiah. Winarno Surachmad (1978 : 32) berpendapat :

Metodologi adalah pengetahuan tentang berbagai cara kerja yaitu dari kerja untuk memahami obyek-obyek yang menjadi sasaran daripada ilmu pengetahuan yang bersangkutan.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang menggunakan suatu metode dimana meneliti status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu kondisi dalam system pemikiran ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif kualitatif ini adalah

untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, factual, dan akurat mengenai gambaran-gambaran, fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang sedang diselidiki (Nazir, Mohammad, 1980 : 63). Penelitian ini digunakan karena dalam fenomena akan diselidiki untuk mengembangkan konsep-konsep yang menghimpun fakta dengan cara subyek penelitian ini berdasar sebagaimana adanya.

Di dalam penelitian ini mengevaluasi kebijakan yang dilaksanakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kebijakan tentang penyelenggaraan sarana dan prasarana pendidikan di kota Yogyakarta, sehubungan dengan hal itu dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif kualitatif merupakan jenis penelitian yang dianggap tepat dalam penelitian ini.

2. Lokasi Penelitian

Daerah yang menjadi obyek penelitian ini adalah Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Yogyakarta.

Adapun alasan memilih Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Yogyakarta sebagai daerah penelitian adalah :

- Jogja sebagai kota pendidikan, sehingga dituntut untuk dapat meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan demi peningkatan

- Penulis tertarik untuk mengetahui pelaksanaan kebijaksanaan yang diambil pemerintah setempat dalam rangka mengatasi persoalan-persoalan dunia pendidikan di wilayahnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam usaha pengumpulan data yang diperlukan dan obyek penelitian akan menggunakan teknik-teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Interview / Wawancara

Merupakan metode pengumpulan data yang diperlukan dengan mengadakan tanya jawab. Tanya jawab ini dilakukan dengan kepala bagian sarana dan prasarana pendidikan, ataupun dengan para pegawai instansi dinas pendidikan dan pengajaran kota Yogyakarta. Manfaat teknik ini menjelaskan sedetail-detailnya pertanyaan yang diajukan. Dengan wawancara dapat diperoleh hasil secara kualitatif yang dapat dipertanggungjawabkan dan mempunyai nilai-nilai yang tinggi. Kesalahpahaman dapat dihindari, pertanyaan-pertanyaan yang disiapkan dapat dijawab oleh informan dengan penjelasan-penjelasan secara langsung.

b. Studi Pustaka

Merupakan langkah yang ditempuh penulis dalam mengumpulkan data untuk mendukung kelengkapan data dari objek penelitian seperti surat kabar, buku, dokumen pemerintah, Undang-Undang.. Dokumen-dokumen atau catatan yang diperlukan dalam penelitian ini adalah catatan atau arsip

yang terdapat di instansi dinas pendidikan dan pengajaran kota Yogyakarta.

Winarno Surcahmad, (1978 : 163) mengatakan :

“Dokumentasi adalah laporan tertulis dari peristiwa yang isinya terdiri dari penjelasan dan pemikiran terhadap peristiwa tersebut. Dengan perumusan tersebut kita dapat memasukkannya ke dalam notulen, rapat, majalah, iklan dan lain sebagainya”.

c. Observasi

Observasi atau pengamatan digunakan dalam pencarian data penelitian untuk mengetahui adanya rangsangan tertentu yang dengan cara mengamati langsung objek-objek penelitian, dalam hal ini adalah bangunan-bangunan sekolah yang ada di wilayah kota Yogyakarta. Dalam hal ini observasi bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang tepat mengenai obyek penelitian sehingga dapat disusun kuisioner yang tepat, serta dapat menyusun desain penelitian yang cermat.

4. Jenis Data

Karena yang digunakan adalah penelitian deksriptif, maka dibutuhkan data penelitian primer dan sekunder. Winarno Surachmad (1978 : 163) berpendapat :

“Data primer ialah data yang lebih dulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang luar dan penyelidik sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu adalah sungguh data yang asli”.

Jenis data dapat dikelompokkan menjadi :

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari keterangan dari pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang ada dipenelitian ini

Pihak yang dimaksud penyusun adalah dinas pendidikan dan pengajaran kota Yogyakarta.

- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung yaitu melalui Undang-Undang, usulan-usulan, media massa, dan sumber diantaranya Undang-Undang pendidikan nasional Nomor 20 Tahun 2003.

5. Teknik Analisis Data

Analisis Deskriptif Kualitatif

Jenis data yang diperoleh dari penelitian atau kepustakaan adalah berupa naratif dan bukan angka-angka namun secara mendetail, jelas dan terinci. Data yang terkumpul dianalisis dengan metode kualitatif dan hasilnya dipaparkan secara deskriptif (uraian).

Penelitian yang bersifat kualitatif menurut Winarno Suracmad dijelaskan sebagai berikut :

“Sifat dari bentuk penelitian deskriptif kualitatif adalah memutuskan dan menafsirkan data yang ada, misalnya tentang situasi yang dialami suatu hubungan kegiatan, pandangan sikap yang nampak, atau tentang proses yang sedang bekerja, kelainan yang sedang muncul, pertentangan yang sedang meruncing, dan sebagainya”.

Dengan hal-hal tersebut diharapkan akan diambil suatu kesimpulan yang dapat diuji kebenarannya sehingga dapat diketahui adanya hubungan sebab akibat antara data-data yang diperoleh dalam suatu penelitian.